

ABSTRACT

LEGAL RESPONSIBILITY IN THE PRACTICE OF MONEY POLITICS IN GENERAL ELECTIONS

By : Nahdluddin Ma'arif

Main Supervisor : Hidayat Andyanto S.H., M.Si.

Assistant Supervisor : Abshoril Fithry, S.H., M.H.

Indonesia is a democratic country where every five years elections are held to elect a leader based on the principles of direct, public, free, secret, and fair in accordance with the 1945 constitution article 22E. The electoral system was chosen directly by the people, in Indonesia the first election was held in 195.

Every scientific paper must have a goal to be achieved. Likewise with the writing of this thesis proposal. The objectives of the writing to be achieved are: to study and analyze how law enforcement in the practice of money politics in general elections, to study and analyze how the obstacles to law enforcement in the practice of money politics in general elections.

The research method in writing this thesis is uses a Statue Approach, and a Conceptual Approach which is carried out by studying laws and regulations and library readings related to existing legal and political issues of money. In practical activities, this approach opens up opportunities to study the consistency and suitability between library readings, laws and the Constitution or between regulations.

General elections are a benchmark for the existence of democracy and citizen participation in determining the political direction of the country for the next five years. Therefore, it is necessary to make efforts from all corners of the nation to ensure the quality of the elections.

As for the results of this study, the author concludes that effective and efficient prevention and supervision should be carried out. As in terms of prevention, namely political and democracy education related to the electoral system in Indonesia, then supervision is carried out that focuses on every process of holding elections. And the emphasis on firm, fair, honest law enforcement for all parties who commit violations of election crimes.

Keywords: *Legal Responsibility, Money Politics, Elections.*

ABSTRAK

TANGGUNG JAWAB HUKUM DALAM PRAKTIK POLITIK UANG (*MONEY POLITIK*) PADA PEMILIHAN UMUM

Oleh : Nahdluddin Ma'arif

Dosen Pembimbing Utama : Hidayat Andyanto, S.H., M.Si.

Dosen Pembimbing Pendamping : Abshoril Fithry, S.H., M.H.

Indonesia merupakan negara demokrasi yang mana setiap lima tahun sekali mengadakan pemilu untuk memilih seorang pemimpin dengan berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, dan adil sesuai UUD 1945 pasal 22E. Sistem pemilihan tersebut dipilih langsung oleh rakyat, di Indonesia pemilu pertama kali pada tahun 1955.

Setiap penulisan karya ilmiah pasti memiliki tujuan yang hendak dicapai. Demikian pula dengan penulisan skripsi ini. Adapun tujuan penulisan yang hendak dicapai yaitu: Untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana urgensi pemberian sanksi terhadap pelaku praktik politik uang, untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana tanggung jawab hukum terhadap pelaku praktik politik uang dalam pemilihan umum.

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*), dan pendekatan Konseptual yang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan bacaan kepustakaan yang berkaitan dengan isu hukum dan politik uang yang ada. Dalam kegiatan praktis pendekatan ini membuka kesempatan untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara bacaan kepustakaan, undang-undang dengan undang-undang dasar atau antar regulasi.

Pemilihan umum menjadi tolak ukur eksistensi demokrasi dan partisipasi warga negara dalam menentukan arah politik negara lima tahun kedepan. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya dari seluruh penjuror bangsa untuk menjamin kualitas pemilu.

Adapun hasil penelitian ini, penulis menyimpulkan agar dilakukannya pencegahan dan pengawasan yang efektif dan efisien. Seperti dari sisi pencegahan yaitu dilakukannya pendidikan politik dan demokrasi terkait sistem kepemiluan di Indonesia, selanjutnya dilakukannya pengawasan yang fokus terhadap setiap proses penyelenggaraan pemilu. Dan penekanan dari penegakan hukum yang tegas, adil, jujur bagi semua pihak yang melakukan pelanggaran tindak pidana pemilu.

Kata Kunci : Tanggung Jawab Hukum, Politik Uang, Pemilu.